

ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS PENGANGGARAN (Studi Kasus Kota Lhokseumawe)

Ridha Mutia¹, Hasan Basri², Syukriy Abdullah³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Correspondence | | |
| Email: ridhamutia24@gmail.com | No. Telp: 0852-2237-7868 | |
| Submitted: 22 September 2023 | Accepted: 1 Oktober 2023 | Published: 2 Oktober 2023 |

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of budgeting in the City Government of Lhokseumawe for 2016 budget year. This research is done by comparing the substance in the documents annual planning, initial budget, revised budget, and budget report. There are 5 local agencies being sampled by reason of the local agencies having relatively big budget, having service function and often become the object of BPK audit. This study used a qualitative approach in the form of case studies with comparative analysis of method. Data collection techniques in this study using observation or field observation, interviews, and documentation. The results of this show that that decrease of the effectiveness of the budget cause by, 1) there is the addition of programs/activities in revised budget; 2) There is addition of new program in revised budget but without activity therein; 3) there is a program whose budget is added in revised budget but until the end of the year its realization does not reach the initial budget; and 4) there are programs that are inconsistent with the planning in the presented in the annual planning document.

Keywords: Budget, Effectiveness, Activity, Program, District Government.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penganggaran di Pemerintah Kota Lhokseumawe selama 1 (satu) anggaran. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan anatara substansi di dalam dokumen RKPD, APBK-Murni, APBK Perubahan, dan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBK. Ada 5 SKPK yang dijadikan sampel dengan alasan SKPK tersebut memiliki anggaran yang relatif besar, memiliki fungsi pelayanan dan sering menjadi objek pemeriksaan BPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus dengan analisis komparatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pengamatan atau observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan keempat dokumen anggaran tersebut menunjukkan bahwa terdapat fakta yang menurunkan efektivitas untuk Tahun anggaran 2016 yaitu, 1) ada penambahan program/kegiatan dalam APBK-P; 2) Ada penambahan program baru dalam APBK-P tetapi tanpa kegiatan didalamnya ; 3) ada program yang anggarannya ditambah dalam APBK-P tetapi sampai akhir tahun realisasinya tidak mencapai anggaran belanja murni; dan 4) ada program yang tidak sesuai dengan perencanaan di dalam RKPD.

Kata Kunci: Anggaran, Efektivitas, Kegiatan, Program, Pemerintah Kota.

1. PENDAHULUAN

Segala aspek pemerintahan termasuk keuangan daerah telah diatur dalam peraturan pemerintahan, berdasarkan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya keuangan daerah menurut Halim (2007:23), dapat diartikan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu adanya anggaran untuk pengambilan keputusan, Mustopadidjaya (1997:8) mengemukakan, bahwa kegiatan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah (APBK) meliputi perencanaan pendapatan dan

pengeluaran. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah tentu saja sangat diharapkan adanya efektivitas penganggaran. Komaruddin (1994) dalam Jaya (2017) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Agung (2005:109), Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Beberapa permasalahan keuangan daerah dipaparkan oleh Marbyanto dalam Nur (2009), yaitu intervensi hak budget DPRD terlalu kuat, Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika, proses perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, ketersediaan dana yang tidak tepat waktu. Kualitas RPJPD, RPJM Daerah dan Renstra SKPK seringkali belum optimal, dan koordinasi antar SKPK untuk proses perencanaan masih lemah.

Pada kenyataannya, permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan pemerintah daerah berpangkal pada penganggaran yang tidak efektif (Anggriani, 2017). Beberapa pihak yang terlibat memiliki kecenderungan berperilaku oportunistik atau mencari keuntungan (Abdullah, 2012). Hasil studi Abdullah (2012a) dalam Abdullah (2016) menunjukkan bahwa lembaga perwakilan di daerah DPRD memiliki kecenderungan oportunistik untuk mengusulkan perubahan target penerimaan daerah dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk kemudian digunakan membiaya kenaikan dalam alokasi belanja yang diusulkan dalam pembahasan rancangan Perda APBK. Kenaikan alokasi belanja yang diajukan DPRD ternyata mengandung masalah keagenan, dimana perubahan dimanfaatkan untuk pemenuhan *self-interest* anggota dewan.

Berbagai kajian dan penelitian mengenai efektivitas penganggaran di Kota Lhokseumawe dimana salah satu masalahnya adalah defisit atau kekurangan dalam anggaran belanja. Pemerintah Lhokseumawe tahun 2016 membuat pencairan dana hasil pelaksanaan sejumlah kegiatan seret alias tersendat. Sejumlah SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kota) Lhokseumawe saat ini tidak mau mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) terhadap hasil pelaksanaan kegiatan. Alasannya karena dana yang tersedia di DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sangat minim, hanya bisa dicairkan untuk keperluan yang mendesak. Pemerintah Lhokseumawe belum mencairkan dana hasil pekerjaan sejumlah proyek dari APBK 2016. Dalam rancangan KUA-PPAS 2017 yang diajukan eksekutif, disebutkan jumlah hutang Pemko Lhokseumawe tahun 2016 yang harus dibayarkan dengan anggaran 2017 mencapai Rp254,48 miliar lebih. Sebelumnya, utang Pemko Lhokseumawe hanya Rp100 miliar lebih akibat kebijakan pemerintah pusat dalam pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 (Portal Satu, 2016). Sehingga, salah satu masalah yang lain timbul yaitu TPK bagi seluruh PNS tidak bias disalurkan, kebijakan itu diambil karena kondisi keuangan Kota Lhokseumawe yang sedang mengalami defisit (Trinbun Barat, 2016).

Berdasarkan latar belakang, dan fenomena yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah efektivitas atas penganggaran pada program dan kegiatan beberapa SKPK di Kota Lhokseumawe, dimana melihat konsistensi antara anggaran yang di rencanakan terealisasi serta yang dilaporkan dalam laporan mulaidari RKPD, APBK Murni, APBK Perubahan dan

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBK. dengan pilihan judul “Analisis Atas Efektivitas Penganggaran (Studi Kasus Kota Lhokseumawe)”

2. KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan daerah; d) Pengeluaran daerah; e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan e) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Penganggaran Daerah

Menurut Abdullah (2017), penganggaran merupakan bagian utama dari pengelolaan keuangan daerah, yakni sebuah proses untuk menghasilkan dokumen anggaran atau rencana keuangan pemerintah daerah. Anggaran disusun untuk dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh SKPD dan unit kerja lain, serta pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Anggaran menjadi alasan dan landasan bagi SKPD dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian. Perencanaan adalah proses untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan dan target kinerja yang akan dicapai dalam program dan kegiatan, yang dijabarkan secara rinci dalam bentuk anggaran. Pelaksanaan adalah proses penyelenggaraan atas semua rencana yang telah ditetapkan dan pembiayaannya telah dirinci dalam dokumen anggaran, termasuk di dalamnya pencatatan dan pertanggungjawaban atas semua aktivitas yang telah dilaksanakan. Sedangkan pengawasan/pengendalian adalah proses penilaian, koreksi, dan evaluasi atas semua pelaksanaan yang sedang dan telah berlangsung.

Proses Penyusunan Anggaran

Secara sederhana, hal yang perlu kita pahami adalah bagaimana mekanisme proses penyusunan anggaran sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Kadangkala instansi di Pemerintah Daerah untuk memahami hal-hal seperti ini masih menggunakan kebiasaan lama sehingga aturan yang telah ditetapkan sering kali tidak dilaksanakan. Secara Singkat, proses penyusunan anggaran merupakan proses pertama dan utama dalam penganggaran karena berdampak langsung terhadap pelaksanaan anggaran. Mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, proses perencanaan dan penyusunan APBK secara garis besar sebagai berikut: a) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b) Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran; c) Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; d) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPK; e) Penyusunan Rancangan Perda APBK; f) Penetapan APBK Secara ringkas.

Efektivitas Penganggaran

Mardiasmo (2009:4), menyatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Menurut Mahmudi (2007:84), efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu kegiatan.

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Mardiasmo, 2009:132). Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya, dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara rencana, kehendak, aturan, sasaran, dengan hasil yang telah dicapai. Pengertian efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas. Sehingga proses penganggaran daerah dapat dikatakan efektif apabila kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan, tanpa melanggar peraturan yang berlaku, dan tepat sasaran.

Pengukuran Efektivitas Anggaran

Menurut Supheni (2013) dalam Mardiasmo (2009), Untuk mengukur efektivitas anggaran sedikitnya dapat diukur dari akuntabilitas penyusunan anggaran dan besarnya *budgetary slack*. Akuntabilitas penyusunan anggaran artinya bahwa anggaran yang disusun sudah memenuhi standar akuntansi dan pos-pos rekening yang muncul dapat dijelaskan secara logis. *Budgetary slack* adalah perbedaan antara anggaran yang dinyatakan dan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksikan. Dua dimensi yang digunakan untuk mengukur *Budgetary Slack*, yaitu kecenderungan eksekutif menetapkan target anggaran di bawah kapasitas produktif yang secara jujur dapat dicapainya (*underestimate revenue*) serta kecenderungan eksekutif memasukkan *excess resource* dalam ajuan anggarannya (*overestimate expenditure*).

Permasalahan Efektivitas Penganggaran

Menurut Anggriani (2017), masih banyak anggaran program dalam APBK-P, tetapi pada saat terealisasi ternyata jumlah yang terealisasi lebih rendah dari pada anggaran murni. Kemudian banyak program yang muncul pada APBK-P, yang kemudian anggaran yang terealisasi cukup tinggi bahkan mencapai 100%. Selain itu terdapat realisasi anggaran belanja yang melampaui PABU dalam APBK-P. Secara aturan, pembayaran melampaui anggaran dapat terjadi jika kondisi darurat atau bencana, atau ada perintah pemda pusat. Atas dasar tersebut penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana efektivitas penganggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan melihat kegiatan dan program yang ada pada dokumen perencanaan RKPD, APBK Murni, APBK-P, hingga LPPA pada tahun 2016.

Menurut Bastian (2006), faktor yang menghambat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi yaitu: 1) dominannya transfer dana dari pusat; 2) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); 3) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan; 4) minimnya kontribusi pajak daerah sebagai sumber penerimaan; 5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah. Untuk memberikan pendapat terkait dengan kinerja BUMD, maka faktor akuntabilitas mempunyai peranan penting dalam memberikan warna dominan. Seperti yang diungkapkan Mardiasmo (2002). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Basri (2014), yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan guna menarik data dari konteks, dimana peristiwa terjadi dalam upaya untuk menggambarkan kejadian-kejadian

sebenarnya sebagai sarana untuk menentukan proses dan perspektif yang tertanam serta turut berpartisipasi dalam peristiwa tersebut, kemudian menggunakan teknik induksi untuk menarik kesimpulan berdasarkan fenomena yang diamati. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus meliputi analisis kontekstual dan mendalam terhadap hal yang berkaitan dengan situasi serupa dalam organisasi lain, sifat dan defnisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini (Sekaran, 2006:46).

Penelitian ini dilakukan pada beberapa SKPK di Kota Lhokseumawe, diantaranya yaitu: Dinas Pengelola Keaunagn dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan Objek penelitian ini adalah dokumen perencanaan dan anggaran Kota Lhokseumawe selama 1 (satu) tahun 2016. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh peneliti seperti alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan.

Penulis menentukan informan yang dipandang layak dan memiliki kompetensi yang sesuai guna menjawab pertanyaan penelitian (Bungin, 2007:122). Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala SKPK dan Kepala Sub Bagian keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian ini juga menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan, proses pengelolaan keuangan Daerah mulai dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban di Kota Lhokseumawe Tahun 2016. Dimana dokumen yang dianalisis meliputi: a) RAKPD (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBK)); b) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Murni (APBK-M); c) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBK-P); d) Pelaksanaan APBK, dan (e); Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Menurut Miles dan huberman (1992) dalam Sugiyono (2010) analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, metode deskriptif analisis menurut Sugiono (2007:29), adalah metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Konsistensi Efektivitas Penganggaran Dilihat dari Nama Program dan Kegiatan Antara RKPD Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2016

Berdasarkan Perbandingan Anggaran pada RKPD, APBK-P dan APBK-L dapat diketahui bahwa konsistensi efektivitas penganggaran masih belum sepenuhnya tercapai, dapat dilihat pada Dinas pendidikan pencapaian target paling rendah terdapat pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu sebesar 34,94% dan paling tinggi terdapat

pada program peningkatan mutu dan tenaga pendidik yaitu mencapai 91,26%. Pada Dinas Kesehatan program penyusunan perencanaan satuan kerja perangkat kerja tidak terealisasi, yang mana artinya tidak disetujui atau tidak dijalankan program tersebut, dan mencapai tertinggi pada program penyedia sarana dan fasilitas penanggulangan penyakit menular yaitu mencapai tingkat konsistensi 99,99%.

Selanjutnya pada Dinas Pekerjaan Umum pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur hanya mencapai target sebesar 6,88%, dimana menyebabkan tidak efektifnya penganggaran program tersebut, tetapi pada program pembangunan infrastruktur pedesaan mencapai 96,71% yang artinya efektivitasnya sangat tinggi. Kemudian, pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga ada pencapaian target yang sangat tinggi pada program peningkatan efektivitas pengelolaan kekayaan daerah sebesar 96,32%. Sedangkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat ada capaian target hanya 35,77% pada program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.

Analisis Efektivitas Penganggaran dari APBK-M ke APBK-P Tahun 2016

Berdasarkan perbandingan program dalam APBK-M dan APBK-P dapat dilihat bahwa: 1) Ada penambahan kegiatan dalam APBK-P yang berjumlah 47 kegiatan yang berasal dari 22 program pada 5 SKPK. Penambahan kegiatan ini hanya terjadi pada program yang sudah ada; 2) Ada penambahan 3 program dan 4 kegiatan pada APBK-P, namun tidak ada kegiatan di APBK-M; 3) Penambahan program disini adalah murni program baru yang memiliki beberapa kegiatan baru. Pada APBK-P ditemukan ada penambahan 5 program baru. Ada 5 perubahan anggaran, penambahan program/kegiatan pada APBK-P, namun pada APBK-M tidak ada anggarannya.

Analisis Efektivitas Penganggaran dari APBK-Perubahan ke Realisasi Anggaran Tahun 2016

Perubahan APBK tahun 2016 untuk anggaran perubahan (APBK-P) yang terjadi untuk pendapatan, belanja, pembiayaan daerah. Pendapatan mengalami penurunan dari Rp1.180.645.303.809 menjadi Rp908.888.389.623,51 atau meningkat sebesar 29,90%. Belanja Daerah juga mengalami penurunan anggaran dari Rp890.338.348.966,21 atau naik menjadi 39,99%. Sedangkan Defisit dari Rp(66.730.562.363,00) menjadi Rp18.550.040.657,30 atau terjadi defisit yang sangat tinggi sebesar 454,34%, dengan adanya defisit yang sangat tinggi membuat penganggaran terhadap program/kegiatan mengalami beberapa masalah diantara penundaan pembayaran gaji PNS di lingkup SKPK Kota Lhokseumawe, memberikan banyak kegiatan atau perencanaan Pemerintah Kota Lhokseumawe terhambat. Perubahan dimaksud adalah ada penambahan program/kegiatan dari setiap SKPK. Masih banyak program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, seperti perbandingan antara APBK-P dan APBK-L dapat dilihat bahwa ada penambahan 50 kegiatan dalam APBK-P dan APBK-L dari 25 program pada 5 SKPK. Berarti setelah APBK-P tidak ada lagi penambahan program/kegiatan sampai dengan akhir tahun.

Analisis Pencapaian Efektivitas Penganggaran dalam Realisasi Anggaran Tahun 2016

Penulis menemukan hasil bahwa masih banyak serapan anggaran untuk program/kegiatan pada SKPK Kota Lhokseumawe mengalami penurunan yang signifikan ini tergambar dari 5 SKPK. Beberapa gambaran program yang mengalami penurunan serapan anggaran yaitu terjadi pada Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya yaitu hanya 4,36%, kemudian ada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu hanya menyerap anggaran 6,88% saja. Begitu juga

dengan beberapa program lainnya yang angka serapannya masih kurang dari 90%. Tetapi ada juga anggaran yang mengalami serapan sedang yaitu >90-90%, diantaranya program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 96,26%. Kemudian program Peningkatan Efektivitas pengelolaan kekayaan Daerah mencapai 96,32%, selanjutnya juga Program pembangunan infrastruktur pedesaan mencapai 96,71%. Dan pada Program Penyedia sarana dan fasilitas penanggulangan penyakit menular pencapaian serapan anggaran pada tahun 2016 hampir mencapai 100% yaitu 99,99%.

PEMBAHASAN

Konsistensi Efektivitas Penganggaran Dilihat Dari Nama Program dan Kegiatan Antara RKPD dengan Anggaran 2016

Menurut Mulyadi (2013) dalam Kunarjo (1996:21) dalam tahap penyusunan menyangkut penentuan sasaran dan strategi pembangunan, diperlukan koordinasi untuk menghindari inkonsistensi antar pola pikir para perencana dan wakil-wakil rakyat. Sedangkan Nawawi (2001:204-205) mengatakan konsistensi dalam arti saling menunjang, baik dalam satu tahun anggaran yang sama, maupun dua atau lebih secara berkelanjutan. Konsistensi dimaksud adalah konsistensi program dan proyek, dengan sasaran dan tujuan strategi organisasi non profit. Dalam mengaitkan tingkat konsistensi dan efektivitas menurut Nursini (2010), Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kapabilitas aparat pemerintah daerah. Aparat pemerintah daerah merupakan pelayan masyarakat yang harus mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan berbagai aturan-aturan yang berlaku secara komprehensif dan konsisten serta mampu memfasilitasi masyarakat atas segala kebutuhan riilnya.

Efektivitas Penganggaran APBK- Umum ke APBK-Perubahan Tahun 2016

Menurut Darise (2006), Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Menurut Abdullah (2013), Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD. Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja. Begitu juga untuk alasan perubahan atas anggaran pembiayaan, kecuali untuk penerimaan pembiayaan berupa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang memang menjadi salah satu alasan utama merngapa perubahan APBD dilakukan.

Efektivitas Penganggaran dari APBK- Perubahan ke Realisasi Anggaran tahun 2016.

Menurut Marzalita, et. al (2014) perubahan anggaran mampu menawarkan perlindungan nilai terhadap ketidakpastian dan merasionalisasi anggaran disaat kondisi yang tidak menentu. Selama periode ketidakpastian pendapatan dan pengeluaran, perubahan anggaran dapat digunakan untuk menyesuaikan kebijakan. Perubahan anggaran yang terjadi di pemerintah di dorong oleh permasalahan teknis, setiap daerah melakukan perubahan untuk menyelesaikan program dengan anggaran serta memenuhi kebutuhan manajemen. Terhadap situasi lingkungan yang berubah.

Menurut Purbadharmaja (2007), Setiap pemerintahan memiliki suatu anggaran pendapatan dan belanja, baik tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan suatu anggaran umumnya meliputi masa waktu satu tahun. Faktor distribusi, stabilisasi, dan alokasi sangat perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu anggaran. Penyusunan anggaran memiliki fungsi yang bersifat integratif dan bersinergi antar komponen dalam pengalokasian anggaran. Dalam hal fungsi anggaran menjadi begitu penting untuk dapat terlaksananya pembangunan ekonomi suatu daerah. Di sisi lain anggaran memiliki banyak kelemahan yang bersifat umum, baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain kelemahan tersebut penyusunan suatu anggaran akan menghadapi berbagai kendala, seperti *political context*, *legal context*, *economic conditions*, dan *historical context*.

Pencapaian Efektivitas penganggaran dalam Realisasi anggaran 2016

Tujuan pelaporan realisasi anggaran menurut PSAP Nomor 02 adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Rukayah (2017), Manfaat informasi realisasi anggaran yaitu menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer, surplus/defisit dan realisasi pembiayaan dari satu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan hasil penelitian berkaitan dengan masing-masing pertanyaan penelitian, ternyata efektivitas penganggaran pada beberapa SKPK Kota Lhoseumawe pada tahun 2016 belum efektif. Hal ini disebabkan masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu:

1. Penganggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe belum efektif, disebabkan masih banyak program/kegiatan anggaran meningkat tetapi realisasinya rendah dari pada anggaran murni.
2. Penganggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk sebagian besar nama program/kegiatan tidak berubah dalam APBK-M, APBK-P, dan APBK-L bahkan sesuai dengan RKPD. Efektivitas penganggaran dari APBK Umum ke APBK Perubahan tahun 2016, berdasarkan hasil dokumentasi dan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa, penganggaran pada Pemerintah Kota Lhokseumawe kurang efektif. Adanya kondisi keuangan yang terjadi defisit yang sangat signifikan yang membuat para PNS mengalami pemotongan tunjangan dan di tambah dengan banyaknya program serta kegiatan yang di rencanakan oleh SKPK terjadi kemacetan.
3. Efektivitas penganggaran dari APBK-Perubahan ke Realisasi anggaran Tahun 2016, maka penulis menyimpulkan bahwa penganggaran masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karna adanya target perencanaan anggaran yang tinggi tidak berbanding dengan realisasi anggaran yang rendah dalam kurun waktu satu tahun APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota).
4. Efektivitas penganggaran dalam realisasi anggaran tahun 2016, maka penulis menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas masih tidak efektif. Terlihat pada banyak

program dan kegiatan yang tidak terealisasi dengan baik, apalagi di tambah dengan kondisi Pemko Lhokseumawe mengalami defisit yang menimbulkan hutang pada pihak ketiga, selain itu juga mempengaruhi kegiatan yang sudah direncanakan pada masing-masing SKPK.

Saran yang dapat penulis sampaikan dengan hasil penelitian yang didapat adalah hendaknya Pemerintah Kota Lhokseumawe memperhatikan lagi tingkat keefektifan penganggaran, lebih meninjau ulang perencanaan program/kegiatan. Selain itu, diharapkan Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih meningkatkan pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran yang ketat sehingga program dan kegiatan dapat masuk pada dokumen sesudahnya, harus termuat dalam dokumen sebelumnya. Di Samping itu, untuk peneliti selanjutnya menambahkan lingkup analisis sampai ke dokumen perencanaan, yakni KUA, PPAS dalam melakukan analisis atas efektivitas anggaran daerah. menggunakan data sekunder yang direncanakan dengan model-model statistik, seperti regresi. Hal ini agar dapat diketahui apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran belanja pada setiap SKPK. Dan juga mengetahui kinerja anggaran di SKPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. (2013). Perubahan APBD. Web Link: <https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/perubahan-apbd/>. (Diakses pada tanggal 13 April 2018).
- _____, Syukriy (2016). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris Dari Perspektif Keagenan. Web Link: <http://syukriy.wordpress.com/2016/11/26/analisis-varian-anggaran-pemerintah-daerah-penjelasan-empiris-dari-perspektif-keagenan/>. (Diakses pada tanggal 13 Juni 2017).
- _____, Syukriy (2017). Penganggaran Pemerintah Daerah (Regulasi, Teori, dan Praktik). Banda Aceh: Fakultas Ekonomi universitas Syiah Kuala.
- Agung, Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Anggriani, Rida. (2017). Efektivitas Penganggaran Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara: *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Basri, H. (2014). Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not A New Agenda. *Jurnal International Conference on Global Trends in Academic Research*, 2(3), 305-312.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Fajar Interpratama
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitatif Inquiry and Research Design*. California Sage Publications.
- Darise, Nurlan. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Macanan jaya Cemerlang.
- Halim, Abdul, (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3. Salemba Empat.
- Jaya, Abdika. (2017). Efektivitas Anggaran Partisipatif dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 1 No. 1. ISSN : 2579-969X.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Marzalita, Nadirsyah dan Syukriy Abdullah. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah. *Jurnal Magister Akuntansi*. Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
- Media Online (2016). <http://www.tribunbarat.com/2016/12/anggaran-habis-pns-lhokseumawe-tak.html> (Diakses pada tanggal 26 Juli 2017).

- _____ (2016). <http://portalsatu.com/read/news/begini-kondisi-keuangan-lhokseumawe> - 20616. (Diakses pada tanggal 26 Juli 2017).
- Muliyadi (2013). Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penerapan Anggaran Kinerja pada Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Reform*, Vol.1 No.1.
- Mustopadidjaya,AR. (1997) Sistem dan Proses Penyusunan APBDN. Modul pada Program Diklat TMPP-D Angkatan XV. Ujung Pandang.
- Nur, Fachurahman. (2009). 13 Masalah Keuangan Negara dan Daerah, Web Link: <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/05/tiga-belas-masalah-keuangan-negara-dan.html>. (Di akses pada tanggal 12 Juni 2017).
- Nursini. (2010). Modeling Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran dalam Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Otonomi daerah (kasus kabupaten/kota di Sulawesi Selatan). Web link: <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/3883?show=full>. Diakses: 23 April 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purbadharmaja, I.B.P. (2007). Kajian Terhadap Fungsi Anggaran dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Buletin Studi Ekonomi* : Volume 12. Nomor 3.
- Rukayah (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*. Vol 4 No.
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 1. Edisi 4. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- _____ . (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.